



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG, DAN PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120

Telepon (021) 85910031, Faksimile (021) 85902505

Nomor : OT.02/LPP-21/D103/2/ 2022 8 April 2022
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan
Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan
Perhubungan Triwulan I Tahun 2022

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Triwulan I Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

A. Capaian Outcome Triwulan I Tahun 2022.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 terlihat pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Outcome Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Triwulan I Tahun 2022

No	Sastra/ IKU	Satuan	Target	Realisasi		Capaian (%)	
			2022	Tw-I	Tw-I	2022	Tw-I
I	<i>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah</i>						
1.1	Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	0	0	0	..%	
1.2	Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien	Rp (Juta)	3.360.752	1.304.794	1.304.794	38,82%	100,00%
1.3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara	Rp (Juta)	1.551	0	0	0,00%	0,00%
II	<i>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional</i>						

No	Sastra/ IKU	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	Tw-I	Tw-I	2022	Tw-I	
2.1	Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	PP	3	0	0	0,00%	0,00%	
2.2	Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target	KP	10	0	0	0,00%	0,00%	
2.3	Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target	PPS	14	0	0	0,00%	0,00%	
2.4	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	3	0	0	0,00%	0,00%	
V	<i>Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L</i>							
5.1	Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	%	100	0	0	0,00%	0,00%	
5.2	Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	%	100	75	75	75,00%	75,00%	
5.3	Persentase K/L/P dengan MRI \geq Level 3	%	50	0	0	0,00%	0,00%	

Kinerja Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sebagaimana pada tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Strategis 1: *Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah*

Pencapaian Sasaran strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara yang Terealisasi
2. Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien
3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Dari hasil pengukuran kinerja sastra 1, berdasarkan hasil pengawasan triwulan I tahun 2022, secara keseluruhan Direktorat Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal

sebesar Rp1.304.794.854.647,86, yang berasal dari efisiensi pengeluaran Negara/ daerah Rp1.304.794.854.647,86.

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja sastra 1 adalah sebagai berikut:

**1.1. Nilai
Optimalisasi
Penerimaan Negara
yang Terealisasi**

Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi adalah nilai optimalisasi penerimaan Negara/ daerah yang dapat direalisasikan berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Penerimaan Negara/ daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/ APBD, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Negara adalah pajak, bea cukai, dan PNBP, serta sumber penerimaan lainnya, penerimaan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan penerimaan Negara/ daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi diukur dari Nilai koreksi Pajak, Bea, Cukai, PNBP, dan/atau penerimaan negara lainnya yang kurang bayar dan/atau pengurangan lebih bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan periode tahun berjalan.

Tidak terdapat target dan realisasi atas Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi pada Ditwas ITRP.

Ringkasan Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan	Nilai (Rp)	Penjelasan
1	Pajak dan Bea Cukai	-	-
2	PNBP	-	-
3	Lainnya	-	-
	Jumlah	-	-

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi pada TW1 tahun 2022 sebesar Rp0,00.

1.2. Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien

Nilai pengeluaran Negara/ daerah yang efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/ pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat berdasarkan hasil pengawasan BPKP. Yang dimaksud dengan perencanaan tidak tepat antara lain tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.

Nilai pengeluaran Negara/ daerah yang efisien diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/kegiatan/program yang tidak tepat dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan/ atau efisien yang direkomendasikan untuk:
 - a) dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih efektif atau lebih hemat;
 - b) rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih efektif atau lebih hemat; atau
 - c) ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- 2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, verifikasi tunggakan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dsb
- 3) Nilai koreksi rencana investasi/rencana biaya operasional pada konsesi, KPBU, pemanfaatan BMN, dsb. berdasarkan laporan hasil pengawasan.

Pada triwulan I tahun 2022, Nilai pengeluaran Negara yang efisien berdasarkan hasil pengawasan BPKP yaitu sebesar Rp1.304.794.854.647,86, mencapai 38,82% dari target tahun 2022 sebesar Rp3.360.752.000.000,00.

Ringkasan Nilai pengeluaran Negara/ daerah yang efisien disajikan pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2. Ringkasan Nilai pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien per Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis Pengeluaran	Nilai (Rp)	Penjelasan
1	Efisiensi Pengeluaran Lainnya	1.304.794.854.647,86	Koreksi atas biaya investasi Perusahaan Jalan Tol Tangerang-Merak
	Jumlah	1.304.794.854.647,86	

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah sampai dengan triwulan I tahun 2022 sebesar Rp1.304.794.854.647,86 diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Realisasi Nilai pengeluaran Negara/ daerah yang efisien dari Hasil Pengawasan Pengeluaran Negara Lainnya
 - Reviu dalam rangka Evaluasi Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Tangerang-Merak dari nilai sebelum reviu sebesar Rp2.789.285.085.402,56 dan nilai setelah reviu Rp1.484.490.230.754,70 atau terdapat koreksi hasil reviu sebesar Rp1.304.794.854.647,86.

1.3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara

Nilai penyelamatan keuangan negara adalah Nilai rekomendasi pengembalian ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan BPKP dan/atau nilai aset yang dipulihkan berdasarkan hasil pengawasan.

Nilai penyelamatan keuangan negara diukur dengan menjumlahkan Nilai rekomendasi pengembalian ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dan/atau nilai aset yang dipulihkan.

Per triwulan I tahun 2022, nilai penyelamatan keuangan negara berdasarkan hasil pengawasan BPKP yaitu sebesar Rp0,00, mencapai 0,00% dari target tahun 2022 sebesar Rp1.551.000.000,00.

Ringkasan nilai penyelamatan keuangan negara disajikan pada table 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Ringkasan penyelamatan keuangan negara Tahun 2022

No	Jenis Pengawasan	Nilai (Rp)	Penjelasan
	Temuan pengembalian Negara	0,00	

2

Sasaran Strategis 2: *Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional*

Pencapaian Sasaran strategis 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
2. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target
3. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target
4. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

Capaian Indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

2.1. Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target Jumlah program prioritas (PP) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah PP yang tercapai target terhadap total jumlah PP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan.

Target kinerja Direktorat untuk kinerja pada tahun 2022 yang sebanyak 3 program prioritas.

Per triwulan I tahun 2022, program prioritas belum dapat direalisasikan pada triwulan I Tahun 2022. Ringkasan kinerja per triwulan I tahun 2022 sebagai berikut:

No	PN	PP yang menjadi target	Sasaran PP	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda ✓
1	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Rasio KPR terhadap PDB	3,30%	0,00%	0,00%	
				Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Kecukupan Luas Lantai per Kapita	94%	0,00%	0,00%	
				Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian	84,08%	0,00%	0,00%	

No	PN	PP yang menjadi target	Sasaran PP	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda ✓
				dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding)				
				Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Perumahan	63,20%	0,00%	0,00%	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	95,10%	0,00%	0,00%	
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	13,45%	0,00%	0,00%	
				Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	25,57%	0,00%	0,00%	
				Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,53%	0,00%	0,00%	
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07 akses layak (termasuk 11,5 akses aman) %	0,00%	0,00%	
				Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2,98%	0,00%	0,00%	
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang dikelola dengan baik di perkotaan	75,28 penanganan, 9,13 pengurangan %	0,00%	0,00%	

No	PN	PP yang menjadi target	Sasaran PP	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda ✓
				Persentase PDAM dengan kinerja 'sehat	91,80%	0,00%	0,00%	
			Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	180 Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	
			Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	26 menit	0,00%	0,00%	
			Meningkatnya Optimalisasi Waduk Multiguna dan Modemisasi Irigasi	Volume tampungan air per kapita	53,90 m ³ /kapita	0,00%	0,00%	
				Persentase luas sawah berrigasi	55,50%	0,00%	0,00%	
				Luas daerah Irigasi premium yang dimodemisasi	568.747 hektar	0,00%	0,00%	
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten /kota	94/72/60%	0,00%	0,00%	
				Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	300 km	0,00%	0,00%	
				Panjang jalan baru yang terbangun	695 km	0,00%	0,00%	
				Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2	0,85	0,00%	0,00%	
				Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	6.396 km	0,00%	0,00%	
				Jumlah Pelabuhan utama yang memenuhi standar	3 (berlanjut) lokasi	0,00%	0,00%	

No	PN	PP yang menjadi target	Sasaran PP	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda ✓
				Jumlah Rute Subside Tol Laut	26 rute	0,00%	0,00%	
				Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	19 pelabuhan (10 selesai 9 berlanjut) pelabuhan	0,00%	0,00%	
				Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	14 (berlanjut) lokasi	0,00%	0,00%	
				Jumlah rute Jembatan udara	42 (berlanjut) rute	0,00%	0,00%	
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ flyover/ underpass (kumulatif)(kota)	5 (berlanjut) Lokasi	0,00%	0,00%	
				Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kumulatif) (kota)	5 (berlanjut) kota	0,00%	0,00%	
				Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	6 kawasan	0,00%	0,00%	

Penugasan Pengawasan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut:

No.	PP	Kegiatan Pengawasan yang telah dilaksanakan
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar (PN/PP: 05/01)	Survei Pendahuluan dan Penyusunan Draft Pedoman Pengawasan Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, antara lain ; a. Pedoman Pengawasan Perumahan Rakyat b. Pedoman Pengawasan Infrastruktur SPAM c. Pedoman Pengawasan Infrastruktur SPAL

2	Infrastruktur Ekonomi (PP/PP: 05/02)	Survei Pendahuluan dan Penyusunan Draft Pedoman Pengawasan Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi, antara lain ; a. Pedoman Pengawasan Pembangunan Bandara b. Pedoman Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan c. Pedoman Pengawasan Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung) d. Pedoman Pengawasan Pembangunan Jalan e. Pedoman Pengawasan Infrastruktur Jalan Tol f. Pedoman Pengawasan Pembangunan Jembatan g. Pedoman Pengawasan Infrastruktur Bendungan dan Jaringan Irigasi h. Pedoman Pengawasan Optimalisasi Program Padat Karya
---	--------------------------------------	---

Program Prioritas yang direncanakan untuk dinilai/dievaluasi pada triwulan berikutnya adalah sebagai berikut:

No.	Program Prioritas	Rencana Pelaksanaan
1	Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar	Triwulan IV
2	Program Prioritas Infrastruktur Ekonomi	Triwulan IV
3	Program Prioritas Infrastruktur Perkotaan	Triwulan IV

2.2. Jumlah Kegiatan Prioritas yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah kegiatan prioritas (KP) yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara jumlah KP yang tercapai target terhadap total jumlah KP yang diawasi secara komprehensif melalui konvergensi pengawasan.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak 10 kegiatan prioritas.

Per triwulan I tahun 2022, kegiatan prioritas belum dapat direalisasikan pada triwulan I tahun 2022. Ringkasan kinerja per triwulan I tahun 2022 sebagai berikut:

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda √
1	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Jumlah Hunian Baru Layak Huni yang Terbangun melalui peran pemerintah	4.423 Unit	0,00%	0,00%	
			Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan	119.000 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator ber tanda √
			Perumahan termasuk SMF dan TAPER A				
			Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	200 042 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah Peningkatan Kualitas Hunian melalui Peran Pemerintah	101 000 Unit	0,00%	0,00%	
			Jumlah luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	696 Hektar	0,00%	0,00%	
			Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan iklim kondusif perumahan melalui reformasi perizinan dan administrasi pertanahan	48 Kabup aten/K ota	0,00%	0,00%	
			Jumlah kabupaten/kota yang mengimplementasikan pemenuhan standar keandalan bangunan	48 Kabup aten/K ota	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator ber tanda √
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	17.288.765 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan	47.011.647 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	9.094.012 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Persentase PDAM dengan kinerja sehat	91,80%	0,00%	0,00%	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (SR)	62.352 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (SR)	284.145 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	1.730.314 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	4.470.423 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	316.629 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator ber tanda √
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	308.845 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	87 Kab/Kota	0,00%	0,00%	
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	83 Kab/Kota	0,00%	0,00%	
			Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2,98%	0,00%	0,00%	
		Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	88,87 m ³ /detik	0,00%	0,00%	
			Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	65%	0,00%	0,00%	
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran	1,09 Nilai	0,00%	0,00%	
			Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per	2,15 Nilai	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator ber tanda √
			1 juta penerbangan				
			Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	0,25 Nilai	0,00%	0,00%	
			Rasio kejadian kecelakaan pelayaran darat per 10.000 pelayaran	0,09 Nilai	0,00%	0,00%	
		Ketahanan ; Kebencanaan Infrastruktur	Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir	0%	0,00%	0,00%	
			Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut	0%	0,00%	0,00%	
			Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api	0%	0,00%	0,00%	
		Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	16,1 miliar m ³	0,00%	0,00%	
			Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	9 unit	0,00%	0,00%	
			Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	10 unit	0,00%	0,00%	
			Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	9 Daerah Irigasi	0,00%	0,00%	

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator ber tanda √
			Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	45.000 hektar	0,00%	0,00%	
2	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan	Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	3 lokasi	0,00%	0,00%	√
			Jumlah lokasi jalan dan jembatan pada kawasan prioritas yang dibangun	9 lokasi	0,00%	0,00%	√
			Jumlah lokasi Jalan yang dipreservasi	92 lokasi	0,00%	0,00%	√
		Konektivitas Kereta Api	Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	178,8 (berlanjut) Km	0,00%	0,00%	√
			Panjang Jalur Kereta Api yang ditingkatkan	123,4 (berlanjut) Km	0,00%	0,00%	√
		Konektivitas Laut	Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	29 lokasi	0,00%	0,00%	√
			Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur	154 rute	0,00%	0,00%	√
		Konektivitas Udara	Jumlah rute jembatan udara (rute)	39 Rute	0,00%	0,00%	√
			Jumlah bandara yang dibangun dan dikembangkan	29 Lokasi	0,00%	0,00%	√
			Layanan Subsidi Angkutan Udara	1 Tahun	0,00%	0,00%	√
		Konektivitas Darat	Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang	44 Lokasi	0,00%	0,00%	√

No	PP	KP yang menjadi target	Indikator sesuai RKP Th 2022	Target (RKP)	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda √
			dibangun dan dikembangkan				
			Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara serta terminal Tipe A yang dibangun	13 Lokasi	0,00%	0,00%	√
			Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun	4 Unit	0,00%	0,00%	√
			Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan	315 Layanan	0,00%	0,00%	√
			Jumlah layanan perintis angkutan jalan	330 Layanan	0,00%	0,00%	√

2.3. Jumlah Proyek Prioritas Strategis yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah proyek prioritas strategis yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara Jumlah PPS yang tercapai target atas total jumlah PPS yang dilakukan pengawasan.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak 14 proyek prioritas strategis.

Per triwulan I tahun 2022, proyek prioritas strategis belum dapat direalisasikan pada triwulan I tahun 2022. Ringkasan kinerja per triwulan I tahun 2022 sebagai berikut:

No	PPS	Indikator sesuai RPJMN/ RKP Th 2022	Target	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beritanda √
1	Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan (Reforma Agraria) Masyarakat	-	-	0,00%	0,00%	√
2	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	-	-	0,00%	0,00%	√
3	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	-	-	0,00%	0,00%	√
4	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)	-	-	0,00%	0,00%	√
5	18 Waduk Multiguna	-	-	0,00%	0,00%	√
6	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	-	-	0,00%	0,00%	√
7	Kereta Api Makassar-Pare Pare	-	-	0,00%	0,00%	√
8	KA Kecepatan Tinggi Pulau	-	-	0,00%	0,00%	√

	Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)					
9	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	-	-	0,00%	0,00%	√
10	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	-	-	0,00%	0,00%	√
11	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	-	-	0,00%	0,00%	√
12	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	-	-	0,00%	0,00%	√
13	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	-	-	0,00%	0,00%	√

2.4. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target diukur dengan membandingkan antara Jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebanyak 3 proyek strategis nasional.

Per triwulan I tahun 2022, proyek strategis nasional belum dapat direalisasikan pada triwulan I tahun 2022. Pengawasan Proyek Strategis Nasional akan dilaksanakan pada triwulan IV Tahun 2022. Ringkasan kinerja per triwulan I tahun 2022 sebagai berikut:

No	PSN	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Sbg Koordinator beri tanda √
1	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	-	-	-	-	√
2	Pelabuhan Patimban	-	-	-	-	√
3	Kereta Api Jakarta - Surabaya	-	-	-	-	√
4	Rumah Susun	-	-	-	-	√
5	Bantuan Rumah Swadaya	-	-	-	-	√
6	Bendungan Ciawi	-	-	-	-	√
7	Bendungan Sukamahi	-	-	-	-	√
8	Jakarta Sewerage System	-	-	-	-	√
9	Kampus Universitas Islam International Indonesia	-	-	-	-	√
10	Jalan Akses Exit Tol	-	-	-	-	√
11	Program Pengembangan Superhub	-	-	-	-	√
12	Bandara Kediri	-	-	-	-	√
13	Bandara Nabire Baru	-	-	-	-	√
14	Bandara Bali Baru	-	-	-	-	√
15	KA Logistik Lahat - Muara	-	-	-	-	√

	Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang					
16	Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng	-	-	-	-	√
17	Pemerataan Ekonomi Reforma Agraria	-	-	-	-	√
18	Tanggul Pantai	-	-	-	-	√

5

Sasaran Strategis 5: *Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L*

Pencapaian Sasaran strategis 5: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
2. Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
3. Persentase K/L/P dengan MRI \geq Level 3

Capaian Indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

5.1. *Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3*

Persentase APIP K/L dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur dari jumlah APIP K/L dengan level kapabilitas APIP \geq Level 3 dibandingkan dengan jumlah total APIP K/L.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 100%.

Per triwulan I tahun 2022, K/L dengan kapabilitas \geq 3 sebanyak 0,00 % (0 APIP K/L dari 4 APIP K/L Mitra), atau mencapai 0,00% dari target tahun 2022 sebesar 100% (4 APIP K/L dari 4 APIP K/L Mitra).

Masih rendahnya capaian disebabkan karena Pernilaian Kapabilitas APIP K/L belum dapat direalisasikan di triwulan I tahun 2022. Penilaian Kapabilitas APIP direncanakan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya. Rincian level kapabilitas APIP K/L yang sudah mencapai level 3 penuh dapat dilihat pada Lampiran III.

5.2. *Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3*

Persentase K/L dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 penuh diukur dari jumlah K/L dengan level maturitas penyelenggaraan SPIP \geq Level 3; dibandingkan dengan jumlah K/L.

Target kinerja ini pada tahun 2022 sebesar 100%.

Per triwulan I tahun 2022, K/L dengan maturitas SPIP \geq 3 sebesar 75% (3 K/L dari 4 K/L Mitra), atau mencapai 75% % dari target tahun 2022 sebesar 100% (4 K/L dari 4 K/L Mitra).

Masih rendahnya capaian disebabkan karena salah satu K/L yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum mencapai target skor ≥ 3 dengan skor 2,336. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk merealisasikan target maturitas SPIP \geq Level 3, yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis secara intensif kepada K/L mitra terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan SPIP. Rincian level maturitas SPIP K/L dapat dilihat pada Lampiran III.

5.3. Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3

Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3 diukur dari jumlah K/L yang melaksanakan pengelolaan risiko dan memenuhi karakteristik MRI \geq Level 3 dibandingkan dengan total K/L.

Target kinerja ini pada tahun 2020 sebesar 50%.

Per triwulan I tahun 2022, K/L dengan MRI ≥ 3 sebesar 0,00% (0 K/L dari 4 K/L Mitra), atau mencapai 0,00% dari target tahun 2022 sebesar 76% (3 K/L dari 4 K/L Mitra).

Masih rendahnya capaian disebabkan tidak ada K/L yang memperoleh nilai MRI ≥ 3 , antara lain disebabkan sampai dengan triwulan I tahun 2022 belum dilakukan evaluasi Level MRI oleh Direktorat pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan pada 4 K/L mitranya.

Rincian level maturitas MRI K/L dapat dilihat pada Lampiran III.

B. Kinerja Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2022

1. Optimalisasi Pemanfaatan KPBU

a. Kecukupan Kualitas Kebijakan dan Tata Kelola

- 1) Terdapat redundansi proses, misalnya adanya proses reviu/evaluasi di masing-masing tahapan KPBU oleh unit yang berbeda dengan obyek reviu/evaluasi yang beririsan;
- 2) Pelaksanaan kerja sama terikat dengan dua regulasi sehingga harus dibuatkan dua perjanjian kerja sama
- 3) Belum ada penjelasan terkait pelaksanaan perjanjian/operasi pada peraturan turunan di Kementerian Perhubungan

b. Rekomendasi

- 1) Mengusulkan perubahan atau amandemen atas Peraturan Menteri Perhubungan No 58 Tahun 2018 untuk menyesuaikan perubahan regulasi KPBU saat ini (Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020) terkait proses tahapan KPBU pada PM 58/2018 hingga tahapan pelaksanaan (operasi).

- 2) Meningkatkan kualitas pemilihan (transaksi) untuk mendapatkan BUP yang lebih berkualitas dan handal, sehingga permasalahan kegagalan *financial close* dapat diminimalisir.

2. Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/ Jasa

a. Analisis Postur Belanja K/L

Postur belanja pada K/L mitra D103.1 memiliki total anggaran sebesar Rp112.059.556.719.000,00, anggaran terbesar dimiliki oleh Kementerian PUPR sebesar Rp103.962.434.602.000,00. Rata-rata anggaran belanja pada mitra D103.1 yang terbesar adalah belanja modal 58,78% dari total anggaran, diikuti dengan belanja barang 36,51% dan belanja pegawai yang berkisar antara 4,71%. Besarnya anggaran belanja Modal terkait dengan Kementerian PUPR yang melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Postur belanja pada K/L mitra D103.2 memiliki anggaran terbesar untuk belanja modal yang berkisar antara 38%-44% dari total anggaran, diikuti dengan belanja barang yang berkisar antara 37%-43% dan belanja pegawai yang berkisar antara 12%-23%.

- ### b. Analisis Rencana Penarikan Dana dan Proyeksi Serapan Belanja Per Triwulan I
- Rencana penarikan dana selama setahun pada K/L mitra D103.1 sebagai berikut: rencana penarikan dana tertinggi diproyeksikan terjadi pada Triwulan IV sebesar 28,16% dari total anggaran, di Triwulan III sebesar 26,14%, dan di Triwulan II sebesar 25,81%, serta penarikan dana terendah ada pada di Triwulan I sebesar 19,89%. Proyeksi penyerapan anggaran belanja K/L menunjukkan pola serapan anggaran yang relatif meningkat pada Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Secara sebaran nilai relatif merata sehingga diharapkan realisasinya tidak menumpuk di akhir tahun anggaran atau di satu triwulan tertentu.

Rencana penarikan dana pada Kementerian Perhubungan untuk masing-masing triwulan berkisar antara 22% s.d 27%. Rencana penarikan dana tertinggi terjadi pada Triwulan IV sebesar 27,50% , diikuti dengan RPD pada Triwulan II sebesar 25,21%, lalu RPD pada Triwulan II sebesar 25,14%, dan RPD terendah pada Triwulan I sebesar 22,15%. Tren proyeksi penyerapan anggaran belanja Kementerian Perhubungan menunjukkan pola serapan anggaran yang relatif meningkat di Triwulan I hingga Triwulan IV. Rencana penarikan dana pada BMKG tertinggi pada TW II, hal ini dibuat untuk menghindari penumpukan kegiatan di TW IV. Namun rencana penyerapan TW IV masih cukup tinggi. Maka

perlu dilakukan optimalisasi kegiatan agar penyerapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun.

c. Analisis Capaian Realisasi Belanja dan PBJ

Total realisasi belanja K/L Mitra D103.1 adalah sebesar Rp10,599 triliun atau 9,46% dari total anggaran setahun. Tingkat penyerapan terbesar pada triwulan I adalah Belanja pegawai sebesar 18,01% dari anggaran Belanja Pegawai, diikuti oleh Belanja modal sebesar 10,40%, dan Belanja Barang sebesar 6,85% dari anggaran belanja masing-masing. Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diinput ke dalam aplikasi SiRUP sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 sebanyak 23.137 paket pekerjaan dengan nilai total pagu anggaran PBJ sebesar Rp86,156 triliun. Nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah tanda tangan kontrak adalah sebesar Rp38,33 triliun atau 35,90% dari pagu anggaran PBJ setahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang jasa melalui tender perlu menjadi prioritas sebagai upaya untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mempercepat penyerapan anggaran K/L.

Realisasi anggaran belanja triwulan I Tahun 2022 pada K/L mitra D103.2 belum sesuai dengan rencana penarikan dana. Total realisasi belanja K/L mitra D103.2 berkisar antara 32% - 41% dari RPD triwulan I. Tingkat penyerapan anggaran terbesar adalah belanja pegawai kemudian belanja barang, sedangkan penyerapan anggaran terendah adalah belanja modal. Sehubungan dengan penyerapan belanja modal paling rendah, maka APIP K/L perlu memberikan monitoring khusus terhadap hal ini. Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang telah diinput ke dalam aplikasi SiRUP sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2022 masih rendah, yaitu sebesar 16% dari total paket PBJ yang harus diinput di SIRUP dalam setahun pada Kementerian Perhubungan dan sebesar 1,82% dari total paket PBJ yang harus diinput di SIRUP dalam setahun pada BMKG. Nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah tanda tangan kontrak juga masih rendah, yaitu dibawah 18% dari pagu anggaran PBJ setahun. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi pengadaan barang/jasa, khususnya melalui penyedia perlu menjadi prioritas sebagai upaya untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan mempercepat penyerapan anggaran K/L.

d. Analisis Hambatan Penyerapan Belanja dan PBJ

Penyebab masih rendahnya pencapaian anggaran pada K/L mitra D103.1 dapat dikelompokkan, sbb.:

- 1) Hilangnya data-data pada aplikasi LPSE Kementerian ATR/BPN, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana semestinya;
- 2) Kurangnya SDM dalam mengoperasikan aplikasi LPSE, sehingga ketika data hilang sangat bergantung dengan admin pusat;
- 3) Proses Revisi anggaran;
- 4) Paket pekerjaan yang sedang dalam proses pertanggungjawaban keuangan; Penyedia jasa belum mengajukan tagihan atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- 5) Masih terdapat paket pekerjaan yang dalam proses tender, belum mulai tender, dan paket pekerjaan yang gagal tender;
- 6) Terbatasnya penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan baik administrasi, teknis maupun harga.

Penyebab masih rendahnya pencapaian anggaran pada K/L mitra D103.2 dapat dikelompokkan, sbb :

- 1) Perencanaan kurang matang
- 2) Adanya pandemi Covid-19
- 3) Belum dilakukan pembayaran termin I atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, serta adanya kegiatan yang belum dilakukan lelang atau kontrak
- 4) Masih terdapat catatan dalam DIPA (tanda blokir), serta terdapat pekerjaan yang masih dalam proses persetujuan Multi Years Contract (MYC)
- 5) Tidak semua kegiatan melalui swakelola tercatat di SPSE
- 6) Dokumen pendukung belum siap (Rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan TOR, RAB, data pendukung lainnya)
- 7) Adanya refocusing anggaran
- 8) Produk dan penyedia di e-katalog belum update
- 9) Terbatasnya calon penyedia dalam SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).

3. Tata Kelola Pendapatan Negara

Sehubungan surat Menteri Perhubungan Nomor KU.102/19/20 PHB 2021 tanggal 15 Juli 2021 hal Koordinasi Optimalisasi PNBPN, kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Tata Kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 11 (sebelas) Satuan

Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 dan 2021 Nomor LR-295/D103/2/2021 Tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana terlampir. Berdasarkan reviu dimaksud, kami sampaikan permasalahan strategis dalam pengelolaan PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yaitu:

- a. Kebijakan perhitungan besarnya fee konsesi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut belum sesuai dengan Kebijakan Menteri Perhubungan. Untuk perhitungan besarnya fee konsesi, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Peraturan Nomor HK.103/4/16/DJPL-18 Tahun 2018. Menurut Peraturan Direktur Jenderal tersebut, fee konsesi dihitung dari pendapatan netto (pendapatan bruto setelah dikurangi dengan biaya tenaga kerja bongkar muat). Kebijakan Direktur Jenderal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 dan PM 48 Tahun 2021 yang antara lain menyatakan bahwa besaran konsesi adalah persentase dari pendapatan bruto. Nilai potensi PNBP yang hilang atas ketidaksinkronan kebijakan dimaksud sekurang-kurangnya sebesar Rp6.334.014.839,00 terjadi pada OP Utama belawan, KSOP Kelas I Tanjung Emas, dan KSOP Kelas II Gresik.
- b. Kebijakan yang mengatur perusahaan jasa terkait kepelabuhanan yang dilakukan oleh BUP di area konsesi belum ada, yang mengakibatkan PNBP menjadi tidak optimal. Kebijakan yang saat ini yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 48 tahun 2021 hanya mengatur mengenai jasa atas kepelabuhanan, sedangkan perusahaan jasa terkait kepelabuhanan yang dilakukan oleh BUP di area konsesi belum diatur. Akibatnya, potensi PNBP tidak optimal karena BUP selama ini tidak melaporkan kegiatan dimaksud dan tidak memasukkan sebagai pendapatan konsesi yang disetorkan ke kas negara. Selain itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penerapan Jasa kepelabuhanan menyatakan bahwa tarif jasa ditinjau paling singkat 2 (dua) tahun sekali kecuali keadaan tertentu. Akibat kebijakan tersebut pada KSOP Tanjung Emas, tarif bongkar muat yang dilakukan oleh PBM Swasta tidak dilakukan peninjauan dan penyesuaian dari tahun 2007, dan pada KSOP

Tanjung Redeb tarif tidak disesuaikan dari tahun 2018. Nilai potensi PNBP yang hilang atas belum adanya kebijakan dimaksud sekurang-kurangnya sebesar Rp19.929.534.308,51

c. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan jasa kepelabuhanan masih kurang memadai. Permasalahan tata kelola jasa kepelabuhanan yang ditemukan meliputi:

- 1) Beberapa pelabuhan beroperasi tanpa izin operasi dan tanpa perjanjian konsesi dengan Penyelenggara Pelabuhan;
- 2) Jasa pandu dan tunda oleh Badan Usaha penerima pelimpahan pandu dan tunda di Perairan Weda, Gebe, dan Perairan Berau tidak dilaksanakan;
- 3) Pengelola tersus mengoperasikan luasan perairan yang tidak sesuai dengan Izin;
- 4) Pengelola tersus tidak memungut jasa penumpukan, jasa pandu dan tunda, jasa pengawasan bongkar muat.

Nilai potensi PNBP yang hilang atas lemahnya komitmen dan kurangnya pengawasan dimaksud sekurang-kurangnya sebesar Rp39.833.803.079,03.

d. Terdapat Kesalahan Perhitungan Tagihan PNBP, Nota Tagihan PNBP yang telah Jatuh Tempo namun belum dibayar, dan denda keterlambatan pembayaran PNBP yang belum diperhitungkan. Nilai PNBP yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan dan denda keterlambatan pembayaran PNBP dimaksud sekurang-kurangnya sebesar Rp2.995.161.789,94.

Disarankan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk:

- a. Melakukan pemantauan atas penagihan PNBP yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan dan denda keterlambatan pembayaran PNBP sebesar Rp2.995.161.789,94;
 - b. Melakukan perbaikan tata kelola atas permasalahan strategis dimaksud di atas agar besarnya nilai PNBP optimal.
4. Pengawasan atas Perusahaan Jalan Tol pada Kementerian PUPR (Non-App)
Hasil reviu dalam rangka Evaluasi Rencana Usaha pada Perusahaan Jalan Tol Tangerang – Merak adalah sebagai berikut:
- a. Biaya investasi tahap I yang wajar yang dapat dimasukkan dalam perhitungan perubahan rencana usaha Perusahaan Jalan Tol Tangerang – Merak adalah

sebesar Rp1.484.490.230.754,70, atau terdapat koreksi negatif sebesar Rp1.304.794.854.647,86;

- b. Sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan tentang Perubahan Rencana Usaha pada Pengusahaan Jalan Tol Tangerang – Merak Nomor 31/BA/Pt.6/2016 tanggal 29 Juli 2016 telah ditetapkan kompensasi berupa tambahan masa konsesi selama 12 tahun menjadi sampai dengan 29 November 2059 dan kenaikan tarif khusus golongan I pada Tahun 2019 sebesar Rp179,00/km (tidak termasuk kenaikan tarif reguler dua tahunan). Berdasarkan hasil reviu, terdapat koreksi atas kompensasi berupa kenaikan tarif khusus golongan I menjadi sebesar Rp125,00/km (tidak termasuk kenaikan tarif reguler dua tahunan) pada tahun 2022.

C. Capaian *Output* Pengawasan Triwulan I Tahun 2022

Realisasi *output* Pengawasan BPKP sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sebanyak 17 Laporan mencapai 18,89% dari target tahun 2022 sebesar 90 Laporan, dengan ringkasan sebagaimana pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 5. Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan BPKP Triwulan I Tahun 2020 pada Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022*	Realisasi Tw. I 2022	Capaian (%)
1	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara	3	1	33,33%
2	Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	3	0	0,00%
3	Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	2	0	0,00%
4	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut			
	Total	8	1	12,50%

*sesuai target pada RKA

Sumber: SIMA dan e-Sakip (selaraskan angka ini di kedua aplikasi)

Penjelasan tabel 2 di atas adalah sebagai berikut:

1. IKK dengan capaian paling tinggi diperoleh dari IKK “Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan” yaitu sebesar 15 dari 59 laporan atau sebesar 25,42%.
2. Capaian kinerja yang masih sangat rendah ditunjukkan oleh IKK “Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L” karena belum dapat direalisasikan di triwulan I tahun 2022.

Rincian *output* pengawasan dapat dilihat pada Lampiran II.

D. Kendala Pencapaian Target

Pada triwulan I tahun 2022, tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pencapaian target kinerja pada Ditwas Bidang ITRP.

E. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2022, telah terealisasi anggaran sebesar Rp395.782.900,00 atau 36,47% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp1.085.034.000,00 dengan ringkasan sebagaimana tabel 6.

Tabel 6. Anggaran dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2022 Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw. III 2020 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	1.085.034.000	395.782.900	36,47%
Program 06 (Pengawasan Intern)	0,00	0,00	0,00%
Jumlah	1.085.034.000	395.782.900	36,47%

Sumber data: Aplikasi SPAN

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Kisyadi

Lampiran I

**CAPAIAN OUTCOME TRIWULAN I TAHUN 2022
PADA DEPUTI PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**

NO	INDIKATOR KINERJA	D1.3	
		Target	Realisasi
1	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara (dlm juta rupiah)	3.360.752	1.305
2	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara (dlm juta rupiah)	1.551	-
3	Jumlah PP yang Tercapai Sesuai Target	3	-
4	Jumlah KP yang Tercapai Sesuai Target	10	-
5	Jumlah PPS yang Tercapai Sesuai Target	14	-
6	Jumlah PSN yang Tercapai Sesuai Target	3	-
7	Persentase APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	100,00%	0,00%
8	Persentase K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	100,00%	75,00%
9	Persentase K/L dengan MRI \geq Level 3	50,00%	0,00%

Keterangan:

BT = Belum ditargetkan

BU = Belum diukur

BTD = Belum tersedia data

RINCIAN KINERJA OUTPUT PENGAWASAN S.D. 31 MARET 2022

Kode Unit Kerja	Unit Kerja	Nama Output	Target	Realisasi	Capaian Output
D1.3	Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan	Rekomendasi hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan negara	3	1	33,33%
		Rekomendasi hasil pengawasan kinerja pembangunan atas program prioritas nasional yang ditargetkan	3	0	0,00%
		Rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko atas kualitas pengendalian intern K/L	2	0	0,00%
		Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	0	0	
		Sub Jumlah	8	1	12,50%

RINCIAN LEVEL KAPABILITAS APIP, LEVEL MATURITAS SPIP, INDEKS MANAJEMEN RISIKO K/L MITRA

No.	Ditwas	Nama K/L	SPIP			APIP		MR	
			Skor	Level	Predikat	Level	Predikat	Level	Predikat
13	D1.3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3,052	3	Terdefinisi	3 DC	Infrastructure	4,17	
14	D1.3	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	2,336	2	Berkembang	3 DC	Infrastructure	1,50	
15	D1.3	Kementerian Perhubungan	3,085	3	Terdefinisi	3 DC	Infrastructure	1,85	
16	D1.3	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	3,227	3	Terdefinisi	3 DC	Infrastructure	3,04	

Ket: Level 3 yaitu level 3 penuh, tidak termasuk level 3 dengan catatan (DC)

Rincian pencapaian target PP tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	PN	PP	Sasaran PP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
1	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Rasio KPR terhadap PDB	3,30%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Kecukupan Luas Lantai per Kapita	94%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Ketahanan Bangunan (Atap, Lantai, Dinding)	84,08%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sertifikat Hak Atas Tanah untuk Perumahan	63,20%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	95,10%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	13,45%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	25,57%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	69,53%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07 akses layak (termasuk 11,5 akses aman) %	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka	2,98%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	75,28 penanganan, 9,13 pengurangan %	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase PDAM dengan kinerja ' sehat	91,80%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan	180 Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan	26 menit	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Meningkatnya Optimalisasi Waduk Multiguna dan Modemisasi	Volume tampungan air per kapita	53,90 m3/kapita	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Persentase luas sawah berrigasi	55,50%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
Luas daerah Irigasi premium yang dimodemisasi	568.747 hektar	0,00%		0,00%	RKP 2022				
2	Infrastruktur Ekonomi	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Persentase kondisi mantap jalan nasional/ provinsi/ kabupaten /kota	94/72/60%	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi	300 km	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Panjang jalan baru yang terbangun	695 km	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2	0,85	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif)	6.396 km	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Jumlah Pelabuhan utama yang memenuhi standar	3 (berlanjut) lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022		

No	PN	PP	Sasaran PP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
3				Jumlah Rute Subside Tol Laut	26 rute	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (kumulatif) (lokasi)	19 pelabuhan (10 selesai 9 berlanjut) pelabuhan	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah bandara baru yang dibangun (kumulatif)	14 (berlanjut) lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
				Jumlah rute Jembatan udara	42 (berlanjut) rute	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ flyover/ underpass (kumulatif)(kota)	5 (berlanjut) Lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah sistem angkutan umum massal di perkotaan besar lainnya yang dikembangkan (kumulatif) (kota)	5 (berlanjut) kota	0,00%	0,00%	RKP 2022		
			Jumlah kawasan di permukiman kumuh perkotaan yang ditangani melalui peremajaan kota	6 kawasan	0,00%	0,00%	RKP 2022		

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
		Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	17.288.765 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan	47.011.647 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman	9 094.012 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase PDAM dengan kinerja sehat	91,80%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala	62.352 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala	284.145 Sambungan Rumah	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (RT)	1.730.314 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (RT)	4.470 423 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	316.629 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	308.845 Rumah Tangga	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	87 Kab/Kota	0,00%	0,00%	RKP 2022		

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
			Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	83 Kab/Kota	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2,98%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan	88,87 m3/detik	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi)	65%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan pelayaran laut per 10.000 pelayaran	1,09 Nilai	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan	2,15 Nilai	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA	0,25 Nilai	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Rasio kejadian kecelakaan pelayaran darat per 10.000 pelayaran	0,09 Nilai	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Ketahanan ; Kebencanaan Infrastruktur	Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir	0%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut	0%	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api	0%	0,00%	0,00%	RKP 2022	

No	PP	KP	Indikator Sesuai RKP Tahun 2022	Target RKP (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
		Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air	16,1 miliar m3	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya	9 unit	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko	10 unit	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi	9 Daerah Irigasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan nonpadi	45.000 hektar	0,00%	0,00%	RKP 2022	
2	Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan	Jumlah lokasi jalan tol baru yang terbangun dan/atau disiapkan	3 lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah lokasi jalan dan jembatan pada kawasan prioritas yang dibangun	9 lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Jumlah lokasi Jalan yang dipreservasi	92 lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Konektivitas Kereta Api	Panjang jalur kereta api yang dibangun (termasuk jalur ganda dan reaktivasi)	178,8 (berlanjut) Km	0,00%	0,00%	RKP 2022	
			Panjang Jalur Kereta Api yang ditingkatkan	123,4 (berlanjut) Km	0,00%	0,00%	RKP 2022	
		Konektivitas Laut	Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut	29 lokasi	0,00%	0,00%	RKP 2022	

Rincian pencapaian target PPS tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PPS	Indikator Sesuai RPJMN/RKP Tahun 2022	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
1	Manajemen Aset Lahan dalam Pemberdayaan (Reforma Agraria) Masyarakat	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
2	Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
3	Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
4	Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (90 Persen Rumah Tangga)	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
5	18 Waduk Multiguna	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
6	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
7	Kereta Api Makassar-Pare Pare	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
8	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa (Jakarta-Semarang dan Jakarta-Bandung)	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
9	Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
10	Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
11	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
12	Jembatan Udara 37 Rute di Papua	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	
13	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan : Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar	-	-	0,00%	0,00%	RKP 2022	

Rincian pencapaian target PSN tahun 2022 yang dilakukan pengawasan

No	Nama PSN	Indikator	Target (%)	Realisasi	Capaian %	Sumber Data	Koordinator
1	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
2	Pelabuhan Patimban	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
3	Kereta Api Jakarta - Surabaya	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
4	Rumah Susun	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
5	Bantuan Rumah Swadaya	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
6	Bendungan Ciawi	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
7	Bendungan Sukamahi	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
8	Jakarta Sewerage System	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
9	Kampus Universitas Islam International Indonesia	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
10	Jalan Akses Exit Tol	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
11	Program Pengembangan Superhub	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
12	Bandara Kediri	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
13	Bandara Nabire Baru	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
14	Bandara Bali Baru	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
15	KA Logistik Lahat - Muara Enim-Prabumulih-Tarahan/Lampung dan Prabumulih-Kertapati/Palembang	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
16	Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung - Buleleng	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
17	Pemerataan Ekonomi Reforma Agraria	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	
18	Tanggul Pantai	-	0,00	0,00	0,00	Permenko 7 Tahun 2021	

Target dan Progres Pencapaian PP sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	PP yang ditargetkan Tercapai	Uraian Kemajuan Pencapaian	Kendala Pencapaian Target	Rencana Tindak

Target dan Progres Pencapaian KP sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	KP yang ditargetkan Tercapai	Uraian Kemajuan Pencapaian	Kendala Pencapaian Target	Rencana Tindak

Target dan Progres Pencapaian PPS sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	PPS yang ditargetkan	Uraian Kemajuan Pencapaian	Kendala Pencapaian Target	Rencana Tindak

Target dan Progres Pencapaian PSN sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

No.	PSN yang ditargetkan	Uraian Kemajuan Pencapaian	Kendala Pencapaian Target	Rencana Tindak